

**SKRIPSI**  
**POSISI PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK DI DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN GOWA**



**DISUSUN OLEH:**  
**SHALZAHIRAH RAKITA PUTRI**  
**E041181329**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**POSISI PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK DI DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GOWA**

Disusun dan Diajukan Oleh :  
**SHALZAHIRAH RAKITA PUTRI**  
**E041181329**

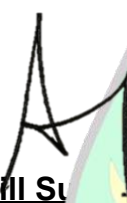
Dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Pada tanggal : 9 Januari 2023

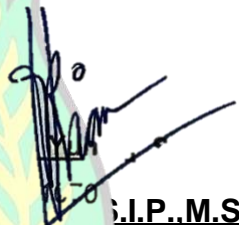
Menyetujui,

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Phil St**  
NIP. 19750

  
**S.I.P..M.Si.**  
51998032002



  
**Dr. H. Andi Yakub. M.Si., Ph.D.**  
NIP. 19621231 1900

**HALAMAN PENERIMAAN**

**SKRIPSI**

**POSISI PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK DI DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GOWA**

Disusun dan Diajukan Oleh :  
**SHALZAHIRAH RAKITA PUTRI**  
**E041181329**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi  
pada Departemen Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

**PANITIA UJIAN**

Ketua : Dr. Phil. Sukri, SIP.,M.Si. (.....)

Sekretaris : Dr. Ariana, S.I.P.,M.Si. (.....)

Anggota : Prof. Dr. Armin, M.Si (.....)

Anggota : Dian Ekawaty, S.IP., MA (.....)

## PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHALZAHIRAH RAKITA PUTRI

NIM : E041181329

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Posisi Perempuan Dalam Jabatan Publik Di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa*" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 19 November 2022

A 10000 Indonesian Rupiah banknote is shown with a signature written over it. The signature is in black ink and appears to be 'Shalza'. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SERIBU RUPIAH', '10000', 'REPUBLIK INDONESIA', and '3AC 1AKX223804496'.

**(SHALZAHIRAH RAKITA PUTRI)**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis hingga saat ini diberikan kesehatan serta dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam tak lupa penulis junjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya serta petunjuk kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta, yaitu Ibu **Rukthanty Hafied** dan Ayah penulis **Almarhum Herman Zain Katoe** yang selalu memberikan dukungan sertairingan doa siang dan malam yang tiada henti – hentinya selalu terucap, terima kasih atas didikannya selama ini, sehingga menjadi alasan utama skripsi ini bisa dan harus diselesaikan. Kepada adik adik tercinta **Zalshabilah Cyrilla Putri, Raffi Moh. Putra Katoe dan Nanda Khalilah Quinta Putri** yang tidak pernah putus memberikan keceriaan, doa, serta dukungan baik secara moril maupun material, beserta seluruh keluarga besar yang penulistidak sempat sebutkan satu persatu, terima kasih semua atas dorongan, motivasi, perhatian, dukungan, dan doa di saat susah dan senang kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan **Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.** selaku Ketua Departemen Ilmu Politik serta bapak **Haryanto, S. IP., M.A** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Politik.
3. **Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si** selaku pembimbing I, yang telah memberi nasehat dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
4. **Ibu Dr. Ariana, S.I.P., M.Si** selaku penasehat pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Ibu Dosen Prodi Ilmu Politik, **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Prof. Muhammad, S.IP., M.Si, Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D, Dr. Gustiana A. Kambo S.IP. M.Si., Dr. Ariana Yunus, S.IP M.Si, Haryanto, S.IP, M.A, Andi Ali Armunanto, S.IP. M.Si., A.Naharuddin S.IP, M.Si., Dr. Muhammad Saad, MA., Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si, Sakinah Nadir S.IP, M.Si., Endang Sari, S.IP, M.Si, Dr. Muhammad Saad, M.A, Ummi Suci Fathia, S.IP, M.Si, Muh. Imran, S.IP, M.Si, Dian Ekawaty, S.IP.M.Si**

Terima Kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga penulis dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin.

6. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan khususnya prodi Ilmu Politik (**Ibu Ija, Ibu Muli, Pak Nadir, Ibu Musriati, Bapak Hamsah dan Pak Samsuddin**), serta staf di Lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
7. Terima kasih kepada para informan khususnya **Bapak Adnan Purichta** selaku Bupati Kabupaten Gowa dan **Bapak Taufiq Mursad** selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa serta pejabat-pejabat perempuan dan laki-laki di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan untuk menunjang skripsi ini, memberikan banyak bantuan dan kemudahan kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman Ilmu Politik Angkatan 2018 (**Revolusi 2018**) yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.
9. Saudara-saudari terbaik sepanjang perkuliahan, **ORMADO (Tarjo, Nabeng, Shinta, Kak Sofi, Falih, Fira, Jihan, Novi), Moris, Anggy, Amirah, dan Auliya** yang selalu bersama dengan penulis dan memberikan dukungan kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat penulis, **FOURTEEN (Shabrina, Dhea, Athiyah, Indy, Zhadela, Naya, Ainun, Sekar), Y (Lily, Nabeng, Pide, Saso, Bila, Mega, Athalia, Sabil)** dan **Keluarga Besar HIPMI PT UNHAS** yang selama ini memberikan semangat, dukungan, dan

doa kepada penulis.

11. Teman terdekat penulis, **Rifqi Irandia** yang selama ini menemani penulis, mendengar keluh kesah penulis, memberikan semangat, dukungan, doa serta menghibur penulis dikala penat dalam urusan skripsi.

Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih yang sebesar – besarnya atas bantuan dan doanya. Semoga bantuan dan keikhlasan mendapatkan balasan dari Allah SWT. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 19 November 2022



**Shalzahirah Rakita Putri**



## ABSTRAK

**Shalzahirah Rakita Putri. NIM E041181329. Posisi Perempuan Dalam Jabatan Publik Di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Di bawah bimbingan Sukri dan Ariana Yunus.**

Birokrasi merupakan salah satu ruang yang hari ini menjadi salah satu perhatian dalam perjuangan kesetaraan kaum perempuan. Perempuan sebagai kelompok penduduk yang jumlahnya mayoritas ditantang untuk ambil bagian menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungannya, termasuk didalamnya jabatan struktural birokrasi. Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa merupakan salah satu contoh kecil dari peran perempuan yang mendominasi jabatan struktural birokrasi. Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan adalah mengapa perempuan mendominasi jabatan struktural di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa serta bagaimana identifikasi gender dalam penentuan pejabat struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan analisis terkait faktor-faktor yang memungkinkan lebih banyaknya perempuan dalam menduduki posisi dibanding laki-laki serta bagaimana identifikasi gender digunakan dalam pengisian posisi jabatan struktural di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai beberapa informan yang sekiranya dapat menjawab rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan perspektif feminisme dan Teori Feminisme Liberal. Adapun konsep yang digunakan yakni konsep gender, perempuan dan jabatan publik.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat 2 faktor yang menyebabkan dominasi perempuan di jabatan struktural, yakni pertama faktor normatif meliputi regulasi terkait pengarusutamaan gender serta pengalaman kerja dan yang kedua adalah faktor politik meliputi kepentingan pemda dalam hal ini Bupati Gowa. Hal tersebut mengungkap bahwa identifikasi gender tidak lagi menjadi indikator utama, jabatan yang diberikan atas dasar kemampuan dan keahlian dan dengan demikian laki-laki serta perempuan memiliki peluang atau akses yang sama.

*Kata kunci : Perempuan, Jabatan Struktural, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa*

## ABSTRACT

**Shalzahirah Rakita Putri. NIM E041181329. The Position of Women in Public Offices at the Gowa District Education Office.** Under the guidance of **Sukri dan Ariana Yunus.**

The bureaucracy is one of the spaces that today becomes one of the concerns in the struggle for women's equality. Women as the majority population group are challenged to take part in facing the changes that occur in their environment, including bureaucratic structural positions. The Gowa District Education Office is one small example of the role of women dominating structural bureaucratic positions. So that in this study the subject of discussion is why women dominate structural positions in the Gowa District Education Office and how to identify gender in the determination of structural officials in the Gowa District Education Office.

This study aims to identify and provide an analysis of the factors that allow more women to occupy positions than men and how gender identification is used in filling structural positions at the Gowa District Education Office. The type of research used is qualitative research. Data collection was carried out by interviewing several informants who were able to answer the formulation of the problem which was the subject of discussion in this study. The author uses the perspective of feminism and Liberal Feminism Theory. The concepts used are the concepts of gender, women and public office.

The results of this study found that there were 2 factors that led to the domination of women in structural positions, namely the first was normative factors including regulations related to gender mainstreaming and work experience and the second was political factors including the interests of the local government, in this case the Regent of Gowa. This reveals that gender identification is no longer the main indicator, positions are given on the basis of ability and expertise and thus men and women have the same opportunities or access.

**Keywords :** *Woman, Structural Department, Gowa District Education Office*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b><i>i</i></b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....	<b><i>ii</i></b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b><i>iii</i></b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b><i>iv</i></b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b><i>viii</i></b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b><i>ix</i></b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Perspektif Feminis.....	13
2.2 Teori Feminisme Liberal.....	17
2.3 Konsepsi Gender.....	26
2.4 Perempuan.....	32
2.5 Jabatan Publik.....	33
2.6 Penelitian Terdahulu.....	37
2.7 Kerangka Berfikir.....	40
2.8 Skema Penelitian.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
3.1 Tipe dan Jenis Penelitian.....	43
3.2 Lokasi Penelitian.....	44
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	44
3.4 Informan Penelitian.....	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6 Teknik Analisis data.....	48
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>50</b>
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Gowa.....	50

4.2 Kondisi Sosial Ekonomi.....	51
4.3 Kependudukan Kabupaten Gowa .....	52
4.4 Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.....	56
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
5.1 Gambaran Keadilan Gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa ...	59
5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Banyaknya Perempuan yang Menduduki Jabatan Struktural di Dinas Pendidikan Kab. Gowa .....	71
5.3 Pengaruh Gender Dalam Pengisian Jabatan Struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.....	88
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 .....	8
Tabel 1.2 .....	10
Table 3.1 .....	46
Table 4.1 .....	55
Table 4.2 .....	57
Table 5.1 .....	69
Table 5.2 .....	70
Tabel 5.3 .....	78
Tabel 5.4 .....	79
Tabel 5.5 .....	89

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Isu atau persoalan wanita selalu menarik untuk diamati, seiring dengan kemajuan zaman tuntutan terhadap wanita semakin komplit. Buktinya tidak sedikit kaum wanita saat ini menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai ibu rumah tangga saja, tetapi sudah meluas kesemua bidang mulai dari politik, sosial, budaya, ekonomi, dan bidang-bidang yang lainnya. Sejak reformasi bergulir wanita Indonesia serta merta mengambil peluang tersebut untuk berperan sesuai dengan keinginan dirinya.

Selama ini kaum perempuan mengalami ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan sistem atau struktur sosial di mana kaum laki-laki atau perempuan menjadi korban. Ketidakadilan tersebut termanifestasikan dalam bentuk marjinalisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan atau pengambilan keputusan politik, stereotip, diskriminasi dan kekerasan.<sup>1</sup> Artinya, ketidakadilan gender bisa diidentifikasi melalui kelima manifestasi ketidakadilan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Fakhri, Mansour. 1997. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

<sup>2</sup> Sunuwati. 2017. Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern). Jurnal Kajian Gender dan Anak An Nisa, 12(2). Hal. 109-110

Pertama, subordinasi (anggapan tidak penting), Subordinasi terjadi pada salah satu jenis seks, yang umumnya pada kaum perempuan ini sering terjadi tidak hanya dalam rumah tangga, masyarakat tapi juga negara. Misalnya anggapan karena perempuan nantinya akan ke dapur, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi, adalah salah satu bentuk subordinasi yang dimaksud. Bentuk dan mekanisme dari proses subordinasi tersebut dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat berbeda. Misalnya, karena anggapan bahwa perempuan itu “emosional” maka dia tidak tepat untuk memimpin partai atau menjadi manajer, adalah proses subordinasi dan diskriminasi yang disebabkan oleh jender. Selama beberapa abad atas alasan agama, kaum perempuan tidak boleh memimpin apapun, termasuk masalah keduniawian, tidak dipercaya untuk memberikan kesaksian, bahkan tidak mendapatkan warisan. Timbulnya penafsiran agama yang mengakibatkan subordinasi dan marginalisasi kaum perempuan itulah yang dipersoalkan.

Kedua, pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu, dan akibat dari *stereotype* itu terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Misalnya, karena adanya keyakinan masyarakat, bahwa laki-laki adalah pencari nafkah (*bread winner*), maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai “tambahan”, karenanya boleh dibayar lebih rendah. Itulah, maka dalam suatu keluarga, sopir (dianggap pekerjaan laki-laki) sering dibayar lebih tinggi dibanding pembantu rumah tangga (peran gender perempuan),

meskipun tidak ada yang bisa menjamin bahwa pekerjaan sopir lebih berat dan sulit di banding memasak dan mencuci.<sup>3</sup>

Namun terlepas dari kontrovensi yang ada, dewasa ini di Indonesia dan juga negara-negara lain, upaya peningkatan peran dan kedudukan wanita terus berlanjut. Salah satu upaya nyata perhatian negara terhadap wanita adalah dimuatnya hal ini dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999<sup>4</sup> Undang-undang nomor 25 tahun 2000,<sup>5</sup> dan dipertegas dalam Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000,<sup>6</sup> ini sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan Gender.

Dalam memasuki abad ke-20 terjadi perubahan struktur peranan wanita Indonesia, ide atau pemikiran dari Barat masuk bersamaan dengan diperkenalkannya dan disebar luaskan pendidikan cara Barat dalam kaitannya dengan politik etika yang dijalankan oleh kaum wanita pemerintah Hindia-Belanda. Walaupun jumlahnya masih terbatas, namun mulai ada wanita yang berkesempatan menikmati pendidikan Barat itu. Oleh karena itu, muncullah orang-orang yang sadar akan diri dan statusnya. Kesadaran mereka pun tumbuh bahwa mereka hidup dibawah kaum penjajahan dengan praktek- praktek kolonialnya, seperti

---

<sup>3</sup> Ibid, Hal. 109-110.

<sup>4</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004

<sup>5</sup> Undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS) tahun 2000-2004

<sup>6</sup> Instruksi Presiden No Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia



R.A.Kartini, Ny.Ahmad Dahlan, Dewi Sartika, dan Hajjah Rasuna Said merupakan tokoh wanita dari kalangan elit modern Indonesia. Dari pendidikan dan pengetahuan yang mereka peroleh, mereka menyadari akan keadaan kaumnya. Maka dengan berbagai cara mereka berusaha untuk menyadarkan kaum wanita akan kedudukan dan perannya dalam masyarakat.

Memasuki abad ke-21 peranan wanita semakin baik, yang menarik bahwa peluang bagi wanita untuk menjabat sebagai pemimpin semakin meningkat. Wanita Indonesia ternyata bisa memperoleh kedudukan, wewenang dan kekuasaan tertinggi sebagai kepala negara. Hal ini bertentangan dengan gambaran umum yang ada dalam masyarakat Indonesia, dimana kaum wanita mempunyai kedudukan yang rendah dan hidup terkekang. Gambaran semacam ini terungkap dalam surat-surat Kartini bahwa ada ungkapan-ungkapan umum yang menggambarkan citra wanita sebagai manusia nomor dua, yang hanya bisa berada dirumah saja.

Secara Konstitusional dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 dinyatakan bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>7</sup> Lebih operasional ditegaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1998 yaitu didalam butir tentang “Peranan Wanita Dalam

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1. Republik Indonesia

Pembangunan Bangsa”, menggariskan bahwa : “Wanita mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan disegala bidang. Pembinaan peranan wanita sebagai mitra sejajar pria ditujukan untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pembangunan...”<sup>8</sup>

Dijelaskan bahwa wanita, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insani pembangunan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pria dalam pembangunan disegala bidang. Wanita diakui sebagai mitra sejajar pria. Jadi, tidak ada masalah bagi wanita untuk mengembangkan potensinya. Meskipun saat ini masih banyak terjadi perlakuan diskriminasi terhadap wanita, namun jumlah wanita yang menduduki posisi strategis sebagai perumus dan pelaksana kebijakan negara semakin bertambah. Persoalannya, perkembangan posisi dan peran wanita sangat lamban dan posisi mereka dilembaga pemerintahan terlihat kurang proporsional. Dari hasil laporan analisis kajian keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyatakan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan laki-laki.

---

<sup>8</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: II/MPR/1998 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Selama ini dimasyarakat tradisional kuatnya budaya patriarki menyebabkan tugas dan peran wanita diidentifikasi sebagai pelaku peranan domestik saja. Hal ini disebabkan karena wanita dianggap memiliki keterbatasan jika melakukan peranan pandangan ini, terbatas disektor domestik yang menyangkut reproduksi biologis saja. Seharusnya peran wanita disektor domestik maupun disektor publik dianggap sama, namun tampaknya hal ini belum terwujud walaupun telah mendapat pengakuan secara yuridis, dan hak wanita dalam kehidupan politik serta pemerintah sudah dijamin. Wanita mempunyai hak untuk bekerja dalam berbagai bidang selagi pekerjaan yang dilakukannya dalam keadaan sopan, memelihara agamanya, tidak melanggar peraturan dan menghindari kesan-kesan negatif terhadap diri dan sekitarnya. Keterlibatan wanita dalam pekerjaan tidak membebaskan mereka dari tanggungjawabnya kepada keluarga. Ini menunjukkan wanita mempunyai 3 (tiga) peranan serentak yaitu sebagai ibu kepada anak, isteri kepada suami dan pekerja kepada Negara. Wanita hari ini telah meratai peranan mereka sebagai pendukung dan penggerak kemajuan negara tanpa melupakan peranan tradisi mereka sebagai isteri dan ibu.

Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam hubungannya dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan

PNS dalam jabatan struktural 3 beserta peraturan pelaksanaannya. Merupakan salah satu dari pengaruh utama Gender sebagai strategi paling mutakhir penyetaraan gender. Kesetaraan gender menjadi sorotan dalam rangka memajukan peran perempuan dalam pembangunan. Dilihat dari sudut pandang kemampuan secara intelektual laki-laki dan perempuan dalam kapasitas dan potensinya sama. Sehingga laki-laki dan perempuan dapat di pandang setara.

Otonomi Daerah memberikan peluang yang menjanjikan perbaikan kondisi masyarakat dalam secercah harapan bagi kita semua, khususnya yang berada didaerah. Dimana peran serta masyarakat baik pria maupun wanita menjadi salah satu tiang penyangga bagi terselenggaranya good government dan good governance dalam pelaksanaan demokrasi, pemerataan dan keadilan. Jadi dalam Undang-undang ini terkandung makna persamaan antara wanita dan pria baik dari segi hak maupun kewajiban sebagai warga Negara.

Di Indonesia sendiri masalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan, kesetaraan hak-hak politik perempuan dan kesetaraan di bidang kerja juga masih menjadi tuntutan aktivis perempuan. Mereka melakukan berbagai kegiatan advokasi dan sosialisasi dengan tujuan memberikan motivasi agar kaum perempuan memiliki kesadaran terhadap hak-hak mereka di bidang pekerjaan dan di bidang politik. Mereka bahkan mendorong agar perempuan memiliki keyakinan untuk terjun secara langsung ke dunia politik sebagai agenda penting agar

perempuan dapat terlibat secara memadai dalam proses politik.

Menumbuhkan kesadaran dan memberikan motivasi kepada perempuan tentang hak-hak mereka di berbagai bidang, terutama di bidang politik dan pekerjaan memang sangat penting. Disadari atau tidak faktor internal yang ada pada kaum perempuan seperti rasa percaya diri dan motivasi untuk berpartisipasi di ranah publik akan menjadi penentu dalam membangun kualitas kesetaraan gender.

Pegawai merupakan kekayaan utama dari setiap organisasi, karena peranannya sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah organisasi dalam pencapaian tujuannya, selain itu pegawai juga merupakan faktor utama dalam manajemen untuk melaksanakan aktivitas organisasi. Begitu juga yang terlihat di Kabupaten Gowa memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 7.145 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1.1** Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Gowa Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	2.605 Orang
2	Wanita	4.540 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>7.145 Orang</b>

Sumber : Data Sekunder di olah tahun 2022<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Administrasi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa (2022)

Pada data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai perempuan di Kabupaten Gowa cukup mendominasi jumlah pegawai laki-laki. Dimana jumlah pegawai perempuan sebanyak 4,540 orang sedangkan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 2.650 orang. Jumlah pegawai perempuan hamper mencapai dua kali jumlah pegawai laki-laki yang ada di Kabupaten Gowa. Data ini juga sejalan dengan persentase penduduk di Kabupaten Gowa, berdasarkan data di Disdukcapil Kabupaten Gowa terdapat 50,42% penduduk perempuan dan 49,57% penduduk laki-laki. Perempuan sebagai kelompok penduduk yang jumlahnya mayoritas ditantang untuk ambil bagian menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungannya. Hal ini dimungkinkan karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang memberi kesempatan pada perluasan kesempatan kerja, dan pengembangan potensi peran karena peningkatan dan kemajuan pendidikan perempuan.

Sayangnya, dominasi jumlah penduduk perempuan serta jumlah pegawai perempuan Kabupaten Gowa yang mayoritas merupakan perempuan tidak sejalan dengan jumlah perempuan yang menduduki jabatan structural di lingkup birokrasi Kabupaten Gowa. Berdasarkan data yang ditemukan penulis, dari 25 Dinas yang berada di Lingkup Kabupaten Gowa mayoritas diisi oleh laki-laki sebanyak 114 orang dan perempuan sebanyak 80 orang. Terlebih lagi jika melihat jabatan Kepala dan Sekretaris dinas dimana hanya terdapat 4 kepala dinas perempuan dan 8 sekretaris dinas perempuan dari 25 dinas. Hal tersebut tentu

membuat posisi laki-laki lebih dominan jika berbicara terkait jabatan structural.

Akan tetapi terdapat kedinasan yang didominasi oleh perempuan di jabatan strukturalnya, dinas tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Meskipun jumlah pegawai laki-laki masih mendominasi, tetapi jabatan structural kebanyakan diisi oleh perempuan. Hal tersebut menjadi menarik untuk melihat refleksi posisi perempuan di jabatan structural Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Dominannya jumlah wanita yang bekerja di jabatan publik Kabupaten Gowa, sehingga penulis tertarik untuk meneliti wanita yang menduduki Jabatan Struktural khusus pada Kantor Dinas Pendidikan. Dan secara keseluruhan jumlah pegawai yang bekerja pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yaitu 53 orang. Dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1.2** Jumlah Pegawai di Kantor Dinas Pendidikan Gowa

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	23
2	Wanita	18
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>

*Sumber :Data sekunder di olah tahun 2022<sup>10</sup>*

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Posisi Perempuan dalam Jabatan Publik (Studi pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa)”**.

---

<sup>10</sup> Administrasi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa (2021)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

- 1.2.1 Mengapa perempuan lebih banyak menduduki jabatan struktrul dibanding laki-laki pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa?
- 1.2.2 Bagaimana identifikasi gender dalam penempatan pada posisi jabatan struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mencermati apakah faktor-faktor yang memungkinkan lebih banyaknya perempuan dalam menduduki posisi dibanding laki-laki.
- 1.3.2 Untuk melihat identifikasi gender itu digunakan dalam penempatan staff dalam posisi jabatan structural di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan literatur bagi penelitian sejenis dan memperkaya kajian tentang posisi perempuan dalam jabatan publik di Indonesia.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan



bacaan yang bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik untuk mengetahui informasi terkait posisi perempuan dalam jabatan publik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Sehubungan pembahasan sebelumnya, maka bab II ini lebih memperjelas dari aspek teoritis. Secara konseptual akan dijelaskan beberapa yang memiliki hubungan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.

#### 2.1 Perspektif Feminis

Sarah Gamble memberikan definisi umum feminisme sebagai “*the belief that women, purely and simply because they are women, are treated inequitably within a society which is organized to prioritise male viewpoints and concerns*”. Feminisme adalah paham, kajian, dan Gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah status subordinat perempuan dalam masyarakat yang mengutamakan perspektif laki-laki. Masyarakat yang mengutamakan kepentingan laki-laki di atas kepentingan perempuan merupakan definisi dari masyarakat yang patriarkis.<sup>11</sup>

Feminisme merupakan perjuangan untuk mengakhiri penindasan terhadap perempuan.<sup>12</sup> Sejalan dengan Jenainati dan Groves, Ross melihat feminisme sebagai semua usaha yang bertujuan untuk

---

<sup>11</sup> Hodgson-Wright, 2006. Hodgson-Wright, Early Feminism, dalam Cambridge Companion to Feminism and Postfeminism, Sarah Gamble (2006).

<sup>12</sup> Jenainati Cathia dan Judy Groves, 2007. Introducing Feminism. Malta: Gutenberg Press.

memperbaiki kondisi perempuan.<sup>13</sup> Dengan mengaitkan definisi umum feminisme dari Gamble, Jenainati dan Groves dan Weedon, feminisme dapat dirumuskan sebagai keyakinan, Gerakan dan usaha untuk memperjuangkan kesetaraan posisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang bersifat patriarkis.

Namun perlu diingat bahwa feminisme bukanlah Gerakan universal dengan konsep homogen yang dapat mewakili seluruh perempuan. Seperti yang ditekankan Tong, feminisme merupakan konsep yang sangat luas dan majemuk. Feminisme merupakan sebuah kata yang memayungi berbagai pendekatan, pandangan, dan kerangka berpikir yang digunakan untuk menjelaskan penindasan terhadap perempuan dan jalan keluar yang digunakan untuk meruntuhkan penindasan tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Mansour Fakhri Gerakan feminisme muncul karena anggapan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat kesalahan dalam memperlakukan perempuan sebagai perwujudan dari ketidakadilan gender. Sejalan dengan konsep feminisme yang lahir dari perdebatan makna gender yang berhubungan dengan jenis kelamin, Anne Okley adalah orang pertama mencetuskan pemakaian kata gender dalam istilah feminisme. Okley mengajak warga dunia agar dapat memahami

---

<sup>13</sup> Ross, Sarah Gwyneth. 2009. *The Birth of Feminism ± Women as Intellect in renaissance Italy and England*. Massachusetts dan London: Harvard University Press

<sup>14</sup> Tong, R. 2009. Tong, Rosmarie. 2009. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. 3<sup>rd</sup> Edition. Colorado: Westview Press

kata seks dan gender, yakni dua kata yang serupa tapi tidak sama. Seks merupakan jenis kelamin yang berkenaan dengan biologis dan fisiologis antara pria dan wanita yang dilihat dari anatomis dan reproduksi. Sedangkan gender lebih mengacu pada perbedaan peranan pria dan wanita dalam suatu tingkah laku sosial yang terstruktur.

Perbedaan pemahaman berdasarkan gender ini menyebabkan perempuan berada dalam bayang-bayang dan genggamannya dominasi laki-laki. Gerak dan Langkah perempuan ditentukan aturan main yang sangat diskriminatif, yang sangat menguntungkan laki-laki. Hal ini diperkuat keyakinan bahwa perbedaan gender dengan segala konsekuensi, baik budaya, ekonomi, sosial, politik, maupun pada ranah sosial lainnya, dipahami dengan kodrat dari Tuhan yang sudah given dan tak terganggu gugat.

Ketimpangan gender yang berupa marginalisasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, pekerjaan, dan masyarakat, dan juga berbagai kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun mental yang disebabkan adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah. Domestikasi perempuan dalam pekerjaan rumah tangga sebagai akibat adanya anggapan bahwa perempuan bersifat rajin, pemelihara, dan sebagainya. Dari ketidakadilan gender tersebutlah maka para feminis berusaha untuk menganalisis sebab-sebab terjadinya penindasan terhadap perempuan. Dalam perkembangannya, feminisme terbagi menjadi beberapa aliran besar dengan teori yang dimunculkan

sebagai landasan bagi upaya pembongkaran dominasi laki-laki terhadap perempuan. Sebab dominasi laki-laki terhadap perempuan tidak hanya berupa penindasan secara fisik, melainkan telah menjadi bagian kesadaran sosial.

Perspektif feminisme dalam penelitian ini digunakan untuk melihat kondisi masyarakat Indonesia khususnya terkait bagaimana perempuan mulai mengambil peran pada berbagai sektor jabatan public di Kabupaten Gowa. Perempuan saat ini telah memasuki ranah publik sebagai bentuk aktualisasi diri untuk turut mewujudkan pembangunan daerah yang sebelumnya banyak bergantung pada laki-laki namun kini peran antara laki-laki dan perempuan sama-sama berjuang untuk menciptakan keberhasilan dalam pembangunan di Kabupaten Gowa.

Perspektif feminisme akan memberi sudut pandang terkait bagaimana posisi perempuan saat ini bukan hanya sebatas untuk proses pembangunan Nasional ataupun Daerah saja, melainkan kedudukan perempuan terhadap pembangunan juga dijadikan sebagai pondasi yang kuat. Jabatan structural di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yang mayoritas diisi oleh perempuan tentu saja dilandaskan oleh sebab-sebab yang logis dan persaingan kompetensi, ini menandakan bahwa kemampuan perempuan khususnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa memperlihatkan kelebihannya. Ini tentu akan menjadi sebuah acuan untuk terus memperjuangkan kesetaraan

dalam ruang lingkup birokrasi khususnya posisi jabatan structural.

## 2.2 Teori Feminisme Liberal

Feminisme Liberal adalah terdapat pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Alison Jaggar dalam bukunya *Feminist Politics and Human Nature*, mengemukakan bahwa dalam pemikiran kaum liberal, sifat asariah manusia yang unik adalah kemampuan rasionalitasnya. Namun argument klasik Arisoteles bahwa manusia adalah *animal rationale* (binatang yang berasio) maka kaum liberal mendefinisikan rasionalitas dalam berbagai aspek termasuk penekanan terhadap moralitas dan kebijaksanaan.<sup>15</sup>

Manusia memiliki kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begiitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka “persaingan bebas” dan punya kedudukan setara dengan lelaki. Feminis Liberal memiliki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Mereka menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum pria, yang terefleksikan menjadi kepentingan yang bersifat

---

<sup>15</sup> Arivia, Gadis. 2003. Filsafat Berspektif Feminis. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan

“maskulin”, tetapi mereka juga menganggap bahwa negara dapat didominasi kuat oleh kepentingan dan pengaruh kaum pria tadi. Singkatnya, negara adalah cerminan dari kelompok kepentingan yang memang memiliki kendali atas negara tersebut. Untuk kebanyakan kaum Liberal Feminis, perempuan cenderung berada “di dalam” negara hanya sebatas warga negara bukannya sebagai pembuat kebijakan. Sehingga dalam hal ini ada ketidaksetaraan perempuan dalam politik atau bernegara. Dalam perkembangan berikutnya, pandangan dari kaum Feminis Liberal mengenai “kesetaraan” setidaknya memiliki pengaruhnya tersendiri terhadap perkembangan “pengaruh dan kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik seperti membuat kebijakan di sebuah negara”.

Feminisme Liberal Pada Abad ke-18 mengatakan Pendidikan yang Sama untuk Perempuan. Mary Wollstonecraft menulis *A Vindication of the Rights of Women* di tahun 1792, berpendapat bahwa perempuan seharusnya memiliki akses yang sama seperti laki-laki pada kesempatan ekonomi dan Pendidikan. Kaum feminis liberal kontemporer ingin membuat perempuan lebih terkenal dalam politik dunia, menghilangkan akses yang berbeda pada kekuatan dan pengaruh atas laki-laki dan perempuan, dan dengan demikian untuk mencapai hak yang sama bagi laki-laki atau perempuan. Mary Wollstonecraft juga menggambarkan masyarakat Eropa yang sedang mengalami kemunduran dimana perempuan dikekang di dalam rumah tidak diberikan kesempatan untuk

masuk di pasar tenaga kerja dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Sedangkan laki-laki diberikan kebebasan untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Padahal kalau perempuan diberikan kesempatan yang sama juga bisa mengembangkan diri secara optimal, asal perempuan juga diberikan Pendidikan yang sama dengan pria. Wollstone berusaha keras untuk mencari solusi bagi hal tersebut dan penyamarataan pendidikanlah solusinya. Dengan menyamaratakan Pendidikan kaum perempuan dengan Pendidikan kaum laki-laki, maka hal itulah yang akan membuat seorang wanita menjadi "*independent women*", bukan hanya menjadi boneka dan mainannya kaum lelaki.<sup>16</sup>

Sedangkan Feminisme Liberal Pada Abad ke-19 mengatakan bahwa Kesempatan Hak Sipil dan Ekonomi bagi Perempuan dan Laki-laki. J.S Mill dan Harriet Taylor Mill bergabung dengan Wollstonecraft. Yang menekankan pentingnya rasionalitas untuk perempuan. J S Mill dan Harriet Taylor Mill lebih jauh menekankan agar persamaan perempuan dan laki-laki terwujud, tidak cukup diberikan Pendidikan yang sama tetapi juga harus diberikan kesempatan untuk berperan dalam ekonomi dan dijamin hak sipilnya yang meliputi hak untuk berorganisasi, kebebasan untuk berpendapat, hak untuk memilih dan milik pribadi serta hak-hak sipil lainnya.

Sumbangan lain pemikiran mereka berdua adalah dua-duanya menekankan pentingnya Pendidikan, Kemitraan dan Persamaan. Mill

---

<sup>16</sup> Ibid Hal 101



lebih menekankan pada Pendidikan dan hak, sedangkan Taylor lebih menekankan kemitraan. Mill lebih jauh juga mempertanyakan superioritas laki-laki, menurutnya bahwa laki-laki itu tidak lebih superior intelektual daeri perempuan. Pemikiran Mill yang juga menarik bahwa kebijakan yang ditempelkan pada perempuan seringkali merugikan perempuan karena perempuan tidak bisa menjadi diri sendiri, sebab ia akan menjadi orang yang dikehendaki masyarakat.<sup>17</sup>

Tindakan Feminisme Liberal Abad ke-20 ini terkesan tidak radikal. Menurut Betty perempuan kelas menengah yang menjadi ibu rumah tangga merasa hampa dan muram. Mereka menghabiskan waktunya hanya untuk berbelanja, jalan-jalan, perawatan, mempercantik diri, memuaskan nafsu suami, dan sebagainya. Sehingga solusi untuk menangani permasalahan tersebut adalah bahwa kaum wanita harus kembali ke sekolah dan kemudian memberikan kontribusi untuk ekonomi keluarga, berkarir namun tetap menjadi ibu rumah tangga juga, berjalan beriringan. Namun duapuluh tahun kemudian ia menyadari dalam bukunya *The Second Stage* bahwa berkarir sekaligus menjadi ibu rumah tangga merupakan hal yang sangat sulit, selain harus melayani suaminya, juga harus melayani majikannya di kantor. Sehingga hal yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pergerakan sehingga menyadari keterbatasan-keterbatasan dalam dirinya yang diciptakan masyarakat sehingga mapu untuk memperbaiki kondisi tersebut, harus

---

<sup>17</sup> Ibid Hal 103

menjalinkan suatu kooperasi dengan kaum laki-laki merubah mindset masyarakat pada bidang public dan privit, yaitu suami pun harus ikut memikul beban keluarga dalam hal ekonomi, rumah tangga dan anak.

Mengingat bahwa feminisme liberal merupakan yang paling banyak penganutnya di Amerika. Pijakan para kaum feminis adalah *The Declaration of Independence* yang menyatakan bahwa kaum laki-laki dan perempuan diciptakan sama. Esensi gender kaum feminis Amerika lebih berpijak pada analisis budaya dan sejarah, jika dibandingkan dengan feminisme Prancis yang lebih menekankan pada psikoanalisis Freud. Elizabeth Cady merupakan tokoh feminis Amerika Serikat yang memprakarsai konvensi hak-hak perempuan di Seneca Falls pada 1848. Dia memperjuangkan hak suara kaum perempuan Amerika Serikat. Teks *Declaration of Independence* menjadi pijakan Elizabeth untuk menulis *Declaration of Sentiments and Resolutions* yang menjadi hasil konvensi dalam pertemuan bersejarah, yaitu Konvensi Hak-Hak Perempuan di Seneca Falls pada 19 Juli 1848. Deklarasi Kemerdekaan Amerika 1776 menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama. Berdasarkan deklarasi tersebut, konvensi menurut prinsip-prinsip liberal diterapkan, baik kepada perempuan maupun laki-laki. Dia menegaskan bahwa kata "*all the people*" dalam Kata "*All the people*" dalam konstitusi Amerika Serikat memiliki arti bukan hanya laki-laki didalamnya, tetapi perempuan juga. Kaum feminis di Amerika Serikat ini menuntut kedudukan profesional, pekerjaan ahli, memprotes upah rendah, dan

bekerja dengan upah yang sama dengan laki-laki. Mereka juga menuntut hak pilih reproduksi dan pelegalan aborsi. Bagaimanapun, selalu ada pro dan kontra akan adanya pergerakan perempuan di Amerika Serikat ini, di satu sisi mereka menganggap bahwa perempuan adalah pribadi yang sama dengan laki-laki, di sisi lain, mereka menganggap bahwa perempuan memiliki perbedaan secara biologis dan psikologis. Hal itu menyebabkan perdebatan amandemen 19 yang menjamin hak pilih perempuan.

*The Liberal National Organization for Women (NOW)* berjuang untuk kemajuan pribadi perempuan. NOW menggunakan kasus hukum, melobi Kongres, dan menekan Presiden untuk menurunkan Batasan-batasan bagi perempuan. Salah satu usulan utama NOW adalah ratifikasi Equal Rights Amendment (ERA) atau Amandemen Persamaan Hak yaitu menghapuskan perbedaan perlakuan terhadap jenis kelamin dalam bidang hukum. Hal ini berhasil memaksa New York Times menghapuskan iklan klasifikasi pekerjaan yang spesifik “Male Only” atau “Female Only”, juga restoran yang dulu hanya untuk konsumsi laki-laki. Integrasi dan reformasi adalah tujuan mereka, bukan pemisah dan revolusi.

Kritik yang paling utama bagi Feminisme Liberal adalah bahwa Feminisme liberal tidak pernah mempertanyakan ideologi Patriarki dan sama sekali tidak menjelaskan akar ketertindasan perempuan. Para kaum Feminisme Liberal hanya berkata bahwa sumber permasalahan

perempuan selama ini adalah karena perempuannya itu sendiri dan solusi yang harus dilakukan adalah dengan membekali kaum perempuan dengan Pendidikan dan juga pendapatan. Kaum Feminis Liberal dianggap tidak mampu untuk melihat bahwa perempuan merupakan golongan yang paling minim mendapatkan akses Pendidikan, entah karena biaya yang mahal ataupun karena diskriminasi yang kerap terjadi. Kemudian bagaimana cara kaum perempuan bisa mendapatkan penghasilan yang layak, sedangkan sebagian besar dari mereka hidup dan tinggal di negara-negara dunia ketiga, yang merupakan korban imperialisme dan hidup di bawah garis kemiskinan.

Secara factual gerakan feminisme Liberal juga dianggap tidak bisa menangkal serangan pemerintah terhadap perempuan, dimana dalam banyak kasus kemanusiaan, perempuan dan anak jadi korban pertama. Para kaum Feminis Liberal dianggap tidak berhasil dalam memberikan penjelasan mengapa secara sexis masih terjadi ketidaksetaraan gender yang sangat signifikan, bukan hanya di negara berkembang, namun di negara kapitalis maju pun masih kerap ditemukan perbedaan gaji dan kesempatan bagi kaum buruh wanita dan laki-laki.

Pola pikir dari arus feminisme yang lahir di Barat tersebut, ditinjau dari perspektif kelas, setidaknya akan memunculkan dua cacat politik. Pertama, konsep ini akan menciptakan terpecahnya konsentrasi 'perjuangan kelas' dari perempuan kelas tertindas untuk membebaskan diri dari kapitalisme. Kedua, konsep ini akan membentuk perspektif

dikotomik-gender yang tidak produktif, yakni sebuah perspektif yang memandang bahwa manusia yang berjenis kelamin laki-laki adalah musuh.

Jean Bethke Elshtain dalam bukunya *A Political Theorist*. Mengkritik bahwa semua perempuan ingin menjadi seperti laki-laki, mengadopsi sifat laki-laki (mengutamakan rasionalitas tidak boleh menunjukkan emosional) untuk mengurangi ketertindasannya. Padahal kaum perempuan tidak boleh menggunakan cara berfikir laki-laki, karena mereka pun memiliki cara berpikir mereka sendiri yang dapat dibedakan dengan cara berpikir laki-laki. Sebagai seorang manusia, mengadopsi cara berpikir keduanya merupakan suatu keharusan, agar tidak mendikotomikan *nurture* dan *nature* itu sendiri.

Selain itu, perlunya membentuk pergerakan yang massif, pergerakan tersebut jangan hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil, karena hal itu jelas akan menghancurkan kumunalitas, sehingga disinilah adanya *commite organizer* itu diperlukan untuk mengorganisasi masa. Dalam *Feminist Politics and Human Nature*, Alison Jaggar memformulasikan kritik yang kedua, seperti Elshtain Jaggar juga mengkritik feminis liberal bahwa perempuan harus mengadopsi nilai laki-laki yaitu rasionalitas dan otonomi. Sedangkan menurut Jaggar kita tidak boleh mendikotomi nilai laki-laki dan perempuan justru laki-laki dan perempuan harus mengadopsi nilai kedua-duanya secara seimbang.

Jagger juga mengkritik feminis liberal yang melihat perempuan itu satu, padahal menurut Jagger perempuan itu tidak satu tapi bermacam-macam. Sehingga solusi dari kaum feminis belum bisa memecahkan segala persoalan, karena mereka terlalu menggeneralisasi seluruh kaum wanita sebagai sesuatu hal yang sama, tanpa berpikir adanya perbedaan diantara mereka. Tidak semua kaum wanita itu berkulit putih, kelas menengah, *straight* dalam sex, satu agama, satu budaya, satu ras, namun banyak juga diantara mereka berkulit hitam, kelas bawah, lesbian, biseksual, PSK, berbeda agama, berbeda budaya, berbeda ras, sehingga faktor ketertindasan kaum wanita beserta solusi pemecahannya pun tentu akan berbeda satu sama lain. Kemudian Feminisme Liberal cenderung menerima nilai-nilai maskulin sebagai manusia, sehingga gerakan mengarah pada emansipasi, cenderung membentuk manusia individualis. Padahal kenyataannya, manusia hidup berkelompok di dalam masyarakat dan mempunyai pemikiran dualistic, kebebasan individu dan bertindak rasional adalah konsep maskulin. Padahal, secara alamiah terdapat perbedaan seks.

Berdasarkan pemaparan diatas, teori feminisme merupakan teori sebagai upaya atas kritikan terhadap studi laki-laki untuk mentransformasikan tekanan structural, dimulai dari pengalaman tekanan sebagai perempuan. Salah satu focus kajian disini adalah mengenai feminisme liberal yang merupakan varian dari feminisme yang mendasarkan pemikirannya berdasarkan konsep liberal dimana pria dan

wanita itu memiliki hak dan kesempatan yang sama, pria dan wanita merupakan makhluk yang sama-sama memiliki rasionalitas. Berbagai gerakan kaum feminis liberal pun muncul khususnya di Amerika, sebagai negara kelahiran, juga negara dengan jumlah kaum feminisme terbesar, yang memberikan pengaruh besar pada saat itu, walaupun banyak kritik yang menyerang pemikiran kaum feminis liberal.<sup>18</sup>

### **2.3 Konsepsi Gender**

Istilah “gender” dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan atau ciptahan Tuhan dan bentukan budaya (konstruksi sosial). Seringkali orang mencampur adukkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati (tidak berubah) dengan yang bersifat non-kodrati (gender) yang bisa berubah dan diubah. Perbedaan peran gender ini juga menjadikan orang berpikir kembali tentang pembagian peran yang dianggap telah melekat, baik pada perempuan maupun laki-laki Seks yaitu Perbedaan bentuk dan fungsi organ biologis laki-laki dan perempuan baik dari ciri-ciri primer maupun sekunder. Perempuan yaitu makhluk ciptaan Tuhan, hasil perbuatan dua insan yang berbeda jenis kelamin dan diciptakan sebagai pasangan hidup laki-laki. Sedangkan Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat

---

<sup>18</sup> Ibid, Hal. 110

berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Karena itu, gender berbicara dalam lingkup tataran kehidupan sosial budaya masyarakat. Sosial budaya adalah segala bentuk sikap, perilaku dan reaksi seseorang atau sekelompok orang terhadap lingkungannya.

Perilaku Manusia dipengaruhi 3 faktor, yaitu :

1. Konstruksi Biologis :
  - a. Berbeda fisik laki dan perempuan
  - b. Tidak dapat Dipertukarkan karna produk Biologi alamiah (Kodrat).
2. Konstruksi Sosial
  - a. Berbeda peran dan Tanggung jawab laki-laki dan perempuan
  - b. Dapat dipertukarkan karna Produk budaya rasa, cipta dan karsa manusia
3. Konstruksi Agama
  - a. Berbeda posisi laki-laki dan perempuan
  - b. Tidak dapat dipertukarkan karna ajaran syariat agama.

Konsep Teori Gender, yaitu :

1. Aliran Nature (kodrati-alamiah), yaitu :
  - a. Terima pembagian peran karena beda Biologis
  - b. Masyarakat hidup berstruktur sehingga ada pembagian tugas
  - c. Tiap posisi punya fungsi secara structural Fungsional.
  - d. Aliran ini digagas oleh Sosiologi : dukrkheim, Spencer, Talcott Parsons.
2. Aliran Nurture (Konstruksi sosial) yaitu :



- a. Bagi peran hasil konstruksi sosial
  - b. Emansipasi dengan Perfect equality
  - c. Pertentang kelas Sosial conflict (dikotomi)
  - d. Keluarga dan agama, lembaga pemantap Diskriminasi
  - e. Aliran ini digagas Tokoh Marxisme : Angel, Machiavelli, Lockwood, Rendal, Collins.
3. Aliran Equil (Keseimbangan), yaitu :
- a. Berbeda karna biologis, naluri, dan sosial budaya
  - b. Tiap jenis kelebihan kekurangan
  - c. Perlu Kerjasama, saling melengkapi, dalam kemitraan yang harmonis Aliran digagas Towner V. Shive (Islam).<sup>19</sup>

Pengarusutamaan Gender adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam seluruh pembangunan di berbagai bidang kehidupan, mulai tahap perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan kesetaraan dalam Aspirasi, Pengalaman, Kebutuhan dan Permasalahan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Adriani, Zulfina. 2010. Pemberdayaan Perempuan Berbasis Gender, Jambi: Pusat Penelitian Gender Universitas Jambi

<sup>20</sup> Instruksi Presiden No Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia

Kebijakan Pengarusutamaan Gender telah tertuang pada beberapa kebijakan sebagai berikut :

A. Instruksi Presiden No Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 memuat 4 instruksi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.
2. Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.
3. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
  - a. Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan gender,
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden.
4. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai

dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing, menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

B. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 maka ditetapkan bahwa:

Setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya. Di dalam Permendiknas nomor 84 tersebut mengatur bahwa setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang merencanakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya.<sup>21</sup>

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011

Pemda berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD (Ayat (1) psl 4). Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender (ayat (2) psl 4). Analisis gender dapat menggunakan

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

GAP atau analisis gender lainnya. Pasal 5A (merupakan tambahan yang mendasar): Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam psl 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS; Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.<sup>22</sup> Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di daerahnya (pasal 7 ayat 1), Pelaksanaan tanggung jawab Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana ayat 1 dibantu oleh Wagub/Wabup/Wawalkot (pasal 7 ayat 2). Gub/Bup/Wakot menetapkan SKPD yang membidangi tugas Perencanaan Pembangunan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di daerahnya (pasal 8)

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:<sup>22</sup>

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. delegasi;

---

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

- f. netralitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektif dan efisien;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;
- k. persatuan dan kesatuan;
- l. keadilan dan kesetaraan; dan
- m. kesejahteraan.<sup>23</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa di dalam aparatur sipil negara, tidak membedakan SARA dan mengutamakan kompetensi yaitu menjalankan tugasnya tentu harus berdasarkan pada profesionalisme dan kompetensi sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya.

## 2.4 Perempuan

Perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminin. Sedangkan perempuan dalam pengertian sex merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa Rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.

Mansour Fakih mendefinisikan gender sebagai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial (*social construction*) dan kultural (*cultural construction*). Seperti anggapan, bahwa

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan dan laki-laki dianggap rasional, kuat, jantan, dan perkasa adalah ciri atau sifat yang tidak permanen dan bisa dipertukarkan atau sifat-sifat tersebut bisa jadi berada pada diri laki-laki maupun perempuan.

Pemahaman masyarakat terhadap perempuan mengalami stereotip dalam persoalan peran sosialnya. Pada struktur sosial budaya tertentu, berlaku norma-norma sosial di mana perempuan diperankan sebagai kaum yang pantas untuk mengurus anak, suami dan bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga, namun harus dibedakan dalam cara melihat persoalan ini lebih menekankan pada gender, identitas jenis kelamin (sex) dikonstruksikan secara alamiah, kodrati, yang merupakan pemberian khusus yang kita bawa sejak lahir. Karena itu, jenis kelamin mempunyai sifat yang tetap, permanen, dan universal. Sedangkan gender adalah seperangkat atribut dan peran sosial-kultural yang menunjukkan kepada orang lain, bahwa kita adalah feminine atau maskulin. Tidak seperti jenis kelamin yang bersifat kodrati, gender dikonstruksikan secara rasional maupun kultural melalui proses sosial yang bersifat dinamis. Sesuai dengan asal usulnya, pembentukan gender didasarkan pada nilai-nilai sosial dan kultural. Oleh sebab itu, gender dapat berubah sewaktu-waktu.

## **2.5 Jabatan Publik**

Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka suatu satuan

organisasi yang disebut dengan jabatan, (Peraturan Pemerintahan RI No. 13 Tahun 2002).

Menurut Garry Dessler (1998:85) jabatan adalah prosedur untuk menentukan tugas-tugas dan hakikat pekerjaan serta jenis orang (berkaitan dengan keterampilan dan pengalaman) yang perlu untuk dilaksanakannya.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Nurmansyah (2009:29) jabatan adalah tahap pertama dalam penyusunan organisasi, dengan adanya pembagian kerja dalam organisasi yang menciptakan banyak pekerjaan.

Jabatan dalam rangka satu satuan organisasi berfungsi menciptakan, menafsirkan dan memperkuat tata tertib yang mengikat anggota-anggota dalam system politik disebut dengan jabatan. Kumpulan jabatan dalam suatu system politik membentuk pemerintahan dari system itu, pemerintah berperan menetapkan aturan-aturan berperilaku bagi anggota masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan masyarakat atau negara.

Jabatan publik adalah jabatan yang diduki seorang sebagai pejabat pemerintah. Dalam penelitian ini menekankan pada jabatan structural yang secara khusus penempatan perempuan kedalam eselonisasi ini. Dan Eselonisasi terkait dengan besarnya tugas dan wewenang dari jabatan yang akan diduduki oleh pejabat yang bersangkutan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Dessler, Gary. 1998. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Indeks

<sup>25</sup> Thoha, Miftah. 2005. Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasi. Jakarta : Raja

Jabatan struktural menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 12 tahun 2002 adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002 untuk dapat diangkat dalam jabatan structural, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil
2. Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan.
3. Memiliki kualifikasi dan tingkat Pendidikan yang diperlukan.
4. Semua unsur penilaian prestasi kerja (daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
5. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.
6. Sehat jasmani dan rohani

Jadi jabatan publik dalam penelitian ini merupakan kedudukan individu yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya sebagai pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi dan keahlian serta keterampilan yang dimiliki untuk



mencapai tujuan dari organisasi.

Pembangunan mempunyai dampak berbeda bagi mereka yang diuntungkan, tidak hanya bagi mereka yang berada pada kelas pengambil keputusan, tetapi ternyata pembangunan juga berdampak bagi kaum laki-laki dibanding kaum wanita. Semejak pemerintah dunia ketiga mendesakkan pentingnya peran wanita dalam pembangunan, reaksinya banyak perancang pembanginan memanfaatkan wanita demi mengefektifkan pembangunan. Gagasan ini telah melahirkan bentuk baru dalam teori dan kebijakan pembangunan yang dikenal *Women in Development* yaitu strategi meningkatkan peran wanita atau melibatkan kaum wanita dalam pembangunan.

Karena adanya keterbatasan dalam strategi sebelumnya maka muncul *Gender and Development* yang memfokuskan pada relasi gender dengan memperjuangkan posisi kaum wanita tidak hanya dalam kebutuhan statis saja tetapi juga dalam kebutuhan strategis. Strategis yang paling mutakhir adalah *Gender Mainstreaming* atau Pengarusutamaan Gender, sebagai strategi alternative dari strategi sebelumnya dengan maksud percepatan terciptanya suatu keadilan gender dimasyarakat dengan menggunakan sarana advokasi, studi dan perencanaan kebijakan. Strategi ini justru menargetkan pada organisasi dan institusi. Dengan strategi-strategi tersebut, saat ini wanita yang menduduki jabatan strategis dalam pembangunan yang berada dalam posisi jabatan publik sudah semakin meningkat.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Di Indonesia Sebagian besar kepemimpinan wanita mengalami perkembangan dalam berbagai sisi kehidupan atau mobilitas vertical. Sudah banyak kaum perempuan yang dapat mengenyam dunia Pendidikan yang sejajar dengan kaum laki-laki sehingga dapat menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan. Beberapa penelitian diantaranya dapat dieksplorasi sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Asriati dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jurnal yang berjudul "*Analisis Peranan Wanita Dalam Jabatan Publik*" Pada tahun 2011.<sup>26</sup> Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai peranan wanita dalam jabatan public. Pembahasan awal dari penelitian ini membahas mengenai rendahnya peranan wanita dalam jabatan public di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir. Faktor yang menyebabkan rendahnya peranan wanita yaitu dari faktor nilai sosial, Pendidikan, pengalaman kerja, mentalitas wanita, dan pemahaman wanita terhadap peran yang diemban. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa kemampuan wanitalah yang menentukan secara langsung derajat kebebasannya dalam memilih sesuatu hal yang wanita inginkan termasuk dalam jawaban, sehingga mereka dapat

---

<sup>26</sup> Asriati. 2011. Analisis Peranan Wanita Dalam Jabatan Publik (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

memainkan peran-peran yang mereka miliki terutama dalam memperjuangkan kaumnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Permatasari dari STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh dalam jurnal yang berjudul "*Peranan Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci*" Pada tahun 2020.<sup>27</sup> Penelitian ini berfokus pada peranan kepemimpinan perempuan dalam jabatan public. Adapun fenomena yang terjadi di Kantor Sekretariat Kabupaten Kerinci yaitu terbatasnya kemampuan kaum perempuan dalam berkomunikasi terkait mengenai jabatan public dan kurangnya pengalaman kerja perempuan dalam jabatan public di karenakan selama ini perempuan kurang di beri kesempatan disbanding pria dalam jabatan public.
3. Penelitian Lita Mewengkang pada tahun 2015<sup>28</sup> melakukan penelitian tentang peranan kepemimpinan perempuan dalam jabatan public studi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa pemimpin perempuan dinilai mampu dalam menjalankan organisasi pemerintahan, mampu berkomunikasi dengan baik, dekat dengan bawahan, mampu berpartisipasi dalam membangun kelurahan, serta kinerja pelayanan

---

<sup>27</sup> Permatasari, Rini. 2020. Peranan Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa*, Vol. 2 No 2

<sup>28</sup> Mewengkang, Lita, Jantje Mandey dan Joorie Marhaen Ruru. 2015. Peranan Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik (Studi Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 No 44

dapat berjalan dengan cepat.

4. Penelitian Eugenia Natalia Meo dan Veronika Ina Assan Boro pada tahun 2021<sup>29</sup> melakukan penelitian untuk mendeskripsikan proses rekrutmen ASN dalam menempati jabatan struktural di Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi minimnyaASN Perempuan menempati jabatan structural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perekrutan Aparatur Sipil Negara menempati jabatan struktural sudah sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014, meskipun belum sepenuhnya diterapkan secara keseluruhan. Selain karena regulasi yang belum dijalankan dengan maksimal teridentifikasi juga faktor lain yang mempengaruhi juga karena kurangnya minat atau kemauan dari perempuan sendiri, ruang dan peluang diberikan tetapi kesadaran dari perempuan untuk ambil bagian masih sangat minim.
5. Penelitian Ariana, Sukri dan Dian Ekawaty pada tahun 2018 melakukan penelitian untuk menganalisa factor impementasi pengarusutamaan gender.<sup>30</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua faktor utama yang menjadi kendala utama dalam

---

<sup>29</sup> Meo, Eugenia Natalia dan Veronika Ina Assan Boro. 2021. Kesetaraan Gender dalam Perekrutan Aparatur Sipil Negara Menempati Jabatan Struktural di Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Perspektif*, Vol 10, No. 1

<sup>30</sup> Ariana, Suktri dan Dian Ekawati. 2018. Mencermati Aspek Pengarusutamaan Gender Dalam Penempatan Pegawai Pada Posisi Struktural Dalam Birokrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 6 No 2

menempatkan perempuan di jabatan struktural yakni faktor internal dan eksternal. Dalam bingkai pengarusutamaan gender, kedua faktor tersebut nampaknya secara terstruktur telah memposisikan perempuan dalam posisi yang sulit untuk bersaing secara setara dengan laki-laki. Meski secara formal baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam konteks penempatan posisi dalam jabatan struktural birokrasi, namun kedua hal tersebut menjadikan seolah perempuan senantiasa sulit untuk dapat bersaing. Dengan demikian untuk bisa menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki, maka kedua faktor tersebut harus bisa diatasi.

## **2.7 Kerangka Berfikir**

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya, (Sugiyono, 2007:38). Adapun indikator yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Nilai-nilai sosial adalah sebagai pengendali perilaku manusia
2. Nilai sosial ini merupakan ukuran-ukuran didalam menilai Tindakan dalam hubungannya dengan orang lain.
3. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karasnya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya.
4. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita

antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.

5. Pengalaman Kerja pengetahuan menentukan kesuksesan seseorang dalam karir, yang dipengaruhi oleh bentuk dan jenis pekerjaan yang spesifik, sehingga mendorong seseorang mencapai penyelesaian yang sempurna dan lebih baik dibandingkan orang lain.

Status Sosial setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing-masing. Status merupakan perwujudan atau pencerminan hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial sering juga disebut kedudukan atau posisi, peringkat seseorang dalam masyarakatnya. Pada semua system sosial, tentu terdapat berbagai macam kedudukan atau status, seperti anak, istri, suami dan sebagainya.

## **2.8 Skema Penelitian**

Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Di dalam sebuah pekerjaan ada laki-laki dan perempuan yang mempunyai posisi jabatan tersendiri. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat keprofesionalan, Standar Kompetensi dalam menduduki jabatan, dan bias gender. Dengan dasar ketiga indikator tersebut sangat mempengaruhi tingkat jabatan publik seseorang.

